

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adrian Sutedi., 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Eko Supriyadi., 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benny Bosu., 1997, *Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*, Mediatama Saptakarya, Jakarta.
- Boedi Harsono., 2003, *Hukum Agraria Indonesia –Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya Jilid 1: Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- H.M. Arba., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Cetakan Kelimabelas, Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta.
- Hermit Herman., 2004, *Cara Memperoleh Hak Milik Tanah Negara, Tanah Pemda dan Peraktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hj Wibowo et al., 2002, *Tata Krama Suku Bangsa Madura*, Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta.
- Kamaluddin Patradi., 2010, *Pemberian Kuasa Dalam Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah*, Press, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emfiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nia Kurniati., 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nico Ngani., 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Rosnidar Sembiring., 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sarjipto Raharjo, 1998, *Relavan Hukum Adat Dengan Modernisasi Hukum Kita*, dalam FH UII (ed), Yogyakarta.
- Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyant., 1998, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina aksara, Jakarta.
- Ter Haar, 1999 *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, , Alfabeta, Bandung.
- Urip Santoso., 2015, *Hukum Agrari Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yamin Muhammad *et al.*, 2011, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Jurnal:

- Afifah Kusumadara, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah : Hak Menguasai Atau Hak Memilki”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Agung Basuki Prasetyo, “Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Di Desa Cigugur Kuningan Melalui Lembaga

Peradilan”, *Law Development & Justice Review*, Vol. 2 No. 2019, Mei 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ardi Saputra Sinaga *et al*, “Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 2 No. 1, Januari 2019, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Budi Handoyo, “Konfigurasi Politik Hukum Pertnahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Responsif”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2018, Fakultas Hukum STAIN Teungku Dirundeng Maelaboh.

Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Muchsin, “Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional”, *Varia peradilan*. Vol. 21 No. 245, April 2006, Jakarta, IKAHI.

Muhammad Irfan *et al*, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke PPAT-AN*, Vol. 1 No. 2, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Muhammad Yamin *et al*, “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2, Juli-Desember, Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan.

Sukirno, “Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Posistif”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2 No. 1, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Zaki Ulya, “Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3, 2015.

Skripsi:

Dian Febrina, 2017, *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pasca Ditetapkannya Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Mei 2017, Makassar.

Rizki Riolita, 2016, *Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Agustus 2016, Semarang.

Dennys Andreas Sutoppo, 2016, *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Februari 2016, Lampung.